

Format Usulan Program RAN OGI 2023-2024

INSTITUSI PENGUSUL: SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network)		
KATEGORI USULAN: "MELANJUTKAN"		
USULAN PROGRAM		
Stakeholder Pelaksana:	:	Kemkumham - Kementerian Hukum dan HAM
Judul Komitmen:	:	Penyediaan Ruang Aman Berekspresi Untuk Memprotes Tindakan dan Kebijakan Pemerintah
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini	:	<p>Menurut laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat bahwa indeks demokrasi dunia menurun dari yang sebelumnya berada di angka 5.44 menjadi 5, 37. Pandemi Covid-19 membuat para penguasa serta elite politik menjadi terbiasa mengecualikan keterlibatan masyarakat dari berbagai diskusi mengenai masalah-masalah yang mendesak saat ini. Indonesia sendiri saat ini berada di urutan ke 64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan perolehan skor 6.3. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu dengan skor 6.48. Namun angka tersebut menjadi angka terendah yang diperoleh Indonesia selama 14 Tahun terakhir serta masuk dalam kategori negara dengan "demokrasi cacat". Adapun indikator yang digunakan EIU antara lain proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil. Di Indonesia, EIU memberikan skor 7.92 untuk proses pemilu dan pluralisme. Sementara itu, fungsi dan kinerja pemerintah dengan skor 7.50, partisipasi politik 6.11, budaya politik 4.38, dan kebebasan sipil dengan skor 5.59. Data tersebut tentu menjadi alarm tanda bahaya bagi demokrasi kita serta menjadi cambuk bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi kedepannya.</p> <p>Beberapa tahun belakangan ini, kualitas Demokrasi Indonesia memang dinilai menurun. Banyak sekali kasus yang ditemukan, seperti dari mulai pemblokiran internet di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 2019 silam hingga yang terbaru terdapat jeratan hukuman hingga 2 tahun penjara apabila menghina lembaga DPR di media sosial di RKUHP. Belum lagi adanya pasal bermasalah di UU ITE yang dinilai dapat membatasi ruang kebebasan berekspresi.</p>
Apa bentuk komitmennya	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekriminalisasi pasal-pasal yang membatasi ruang kebebasan berekspresi di KUHP (termasuk RKUHP) dan UU ITE 2. Penyelesaian Restorative Justice untuk penyampaian protes warga atas tindakan dan kebijakan pemerintah 3. Menyediakan ruang komunikasi lintas K/L dalam upaya dekriminalisasi jika ada Pembela HAM yang

		terjerat KUHP dan UU ITE	
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik	:	Indonesia masih mempertahankan sebagian besar pasal pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE meskipun Indonesia telah meratifikasi ICCPR. Indonesia juga belum memberikan perlindungan bagi Pembela HAM. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia antara tahun 2020 dan 2021, sebagian besar kasus pelanggaran kebebasan berekspresi terjadi di ruang digital. Berdasarkan laporan SAFEnet dari 2018 hingga 2021, ada 56 kasus yang ditargetkan pada Pembela Hak Asasi Manusia. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi 147 serangan digital, dan 193 serangan pada tahun 2021. Hampir 60% serangan ditujukan kepada Pembela Hak Asasi Manusia. Masalah ini dapat diatasi dengan melakukan dekriminialisasi pasal-pasal yang membatasi ruang kebebasan berekspresi di KUHP (termasuk RKUHP) dan UU ITE, mulai dari defamasi, ujaran kebencian, penghinaan terhadap presiden dan penguasa. Selain itu, masalah di tingkat penerapan, dapat diatasi dengan mendorong penyelesaian RJ atas kasus-kasus yang (akan) terjadi. Dengan ruang komunikasi bersama, koordinasi antar K/L terkait kasus di mana terjadi kriminalisasi ekspresi dapat diselesaikan.	
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah	:	Hal yang relevan dari komitmen tadi adalah adanya jaminan atas <i>Partisipasi</i> dan <i>Akuntabilitas</i> kinerja pemerintahan. Partisipasi bukan saja dalam bentuk pelibatan di ruang-ruang pertemuan, tetapi juga bentuk partisipasi yang berada di luar ruangan, yang disampaikan secara terbuka di muka umum.	
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	:	Open Civic Space and Democracy	
Penerima Manfaat	:	Kelompok masyarakat seperti jurnalis, pejuang lingkungan, aktivis anti-korupsi, pembela hak asasi manusia.	
Informasi Tambahan	:	Laporan SAFEnet atas Situasi Hak Digital di Indonesia 2018-2021	
Sumber Dana Pengusul:	:	Tanggung renteng	
Indikator Capaian dengan Target Terukur	:	Waktu Mulai	Waktu Berakhir
1. Perubahan rumusan pasal di KUHP dan ITE 2. Penurunan 10% dari persentase kriminalisasi ekspresi tahun sebelumnya		<i>September 2022</i>	<i>Desember 2024</i>
Informasi Kontak : Damar Juniarto Direktur Eksekutif SAFEnet			

08119223375 (Sekretariat)
info@safenet.or.id

Nama PIC dari K/L atau OMS Pengusul	:	
Departemen / Jabatan	:	
Email	:	
Nomor Handphone	:	